KAWAL PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN, OMBUDSMAN PAPUA BARAT KUNJUNGI BPOM MANOKWARI

Jum'at, 08 Mei 2026 - papbar

MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat mengambil langkah proaktif dalam membangun jaringan kerja sekaligus mengoptimalkan fungsi pengawasan pelayanan publik pada sektor peredaran obat dan makanan. Komitmen pengawalan tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi lintas lembaga ke Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari pada Kamis (8/5/2026).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, memaparkan bahwa pertemuan strategis ini bertujuan untuk mempertegas dan memperkuat pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan keamanan sirkulasi produk konsumsi di wilayah Manokwari maupun Papua Barat secara umum.

"Koordinasi ini dilakukan oleh Ombudsman Papua Barat dalam rangka memperkuat pengawasan pelayanan publik serta pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Papua Barat," ujar Atkana.

Lebih lanjut, Atkana menekankan bahwa sinergi lintas instansi menjadi elemen esensial untuk memacu mutu pelayanan publik, terutama pada sektor kesehatan dan perlindungan konsumen. Melalui pendampingan ini, Ombudsman terus mendorong agar setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dipastikan berjalan secara profesional, mudah diakses, serta terbebas dari segala bentuk maladministrasi.

Merespons langkah proaktif dari Ombudsman, Kepala BPOM di Manokwari, Tince Werimon, menyambut positif sinergi pengawasan tersebut dan memaparkan langkah-langkah preventif yang tengah difokuskan oleh instansinya.

"BPOM di Manokwari berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih produk yang aman dan memiliki izin edar resmi," ucap Werimon.

Agenda pertemuan strategis ini diakhiri dengan kesepakatan dan komitmen bersama antara kedua lembaga untuk terus memperketat rantai pengawasan peredaran obat dan makanan demi melindungi hak-hak dasar masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat. (ORI-Papbar)